Stabilisasi Politik, Ekonomi dan Sosial Masa Orde Baru

4. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Orde Baru

Pada Orde Baru berdasarkan pada Trilogi Pembangunan yang mencakup aspek-aspek berikut.

a. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi

Programnya dibagi 2:

- Jangka Pendek: Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita / Pelita) mulai 1969, diatur dalam GBHN oleh MPR 1973-1993.
- Jangka Panjang: Direncanakan untuk 25 tahun. Bersamaan dengan program Pelita,

Implementasi program-program tersebut diarahkan pada beberapa bidang berikut.

a. Pertanian

Jadi fokus utama karena mayoritas rakyat petani. Caranya dengan ekstensifikasi, intensifikasi, mekanisasi, diversifikasi, plus pemerintah membentuk Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk duku ng produktivitas pertanian.

Program pengembangan intensifikasi pertanian diterapkan melalui Pancausaha Tani yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut.

- Pemilihan bibit unggul
- Pengelolaan tanah yang baik
- Pemupukan
- Irigasi
- Pemberantasan hama

Dalam pelaksanaannya, intensifikasi pertanian terus dikembangkan menjadi program Saptausaha Tani. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan berikut.

- Pengelolaan tanah yang baik
- Pengairan yang teraturPemilihan bibit unggul
- Pemupukan
- Pemberantasan hama dan penyakit tanaman
- Pengolahan pascapanen
- Pemasaran hasil pertanian

Mekanisasi Pertanian:

- Traktorisasi (1970-an): Untuk atasi kekurangan tenaga kerja karena panen serentak. Pemerintah kasih hibah traktor + kredit bunga rendah ke kelompok tani, jadi muncul usaha jasa traktor.
- Mekanisasi Panen (1980-an): Pemerintah kasih hibah mesin perontok padi + kredit bergulir, jadi muncul usaha jasa panen.

Diversifikasi Pertanian: Supaya penghasilan petani nambah, selain nanam padi didorong usaha lain seperti ternak ayam, ikan, dan tanam tanaman bernilai tambah.

Dukungan Benih & Teknologi:

- Awal Orde Baru kasih subsidi benih padi hasil tinggi dari IRRI, Filipina, hasilnya produksi padi naik terutama di Jawa.
- Pemerintah bentuk BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) yang berhasil buat VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng).

b. Ekonomi

1. Peningkatan Peran BUMN: Presiden Soeharto anggap pemerintah adalah arsitek pembangunan. Terbit UU No. 9 Tahun 1969 - pengawasan BUMN yang tadinya di instansi teknis, dialihkan jadi satu-satunya di bawah Departemen Keuangan.
2. Perluasan Lapangan Kerja:
    - Lewat proyek padat karya untuk atasi pengangguran, penganggur disuruh bangun jalan & jembatan, terutama di daerah produksi pangan rendah.
    - Untuk desa, lewat BUTSI (Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia) - kirim tenaga kerja sukarela terdidik ke desa sebagai pelopor pembangunan.

c. Pendidikan

Tujuan: Tingkatkan SDM, fokus SD & SMP karena banyak rakyat belum sekolah formal & fasilitas minim. Diberi kesempatan luas terutama untuk golongan menengah ke bawah.

Kebijakannya:

- Ganti Kurikulum 4x: 1968, 1975, 1984, 1994 - disesuaikan kondisi politik & perkembangan dunia.
- Bangun SD Inpres: Lewat Inpres No.10/1973. Tahap pertama bangun 6.000 SD Inpres dengan 3 ruang kelas, terus berlanjut tiap tahun. Dampaknya jumlah guru naik pesat. Biayanya hampir Rp 6,5 triliun.
- Program Wajar (Wajib Belajar) 1984: Awalnya wajib 6 tahun (usia 7-12 tahun), lalu berhasil jadi 9 tahun (sampai SMP).
- GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh): Untuk bantu anak kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan yang tinggal di daerah terpencil biar tetap sekolah.

5. Pers dan Komunikasi Sosial (1966-1998)

Awalnya Orde Baru janji kebebasan pers lewat UU Pers No.11 Tahun 1966, tapi kenyataannya kontrol ketat demi stabilitas politik & kekuasaan.

Caranya:

- Lewat Tap MPRS, Peraturan Menteri, dan UU No.21 Tahun 1982 tentang SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Izin bisa dicabut kapan saja kalau dianggap mengancam stabilitas atau tidak sejalan dengan pemerintah.
- Dibreidel (ditutup paksa): Contoh terkenal majalah Tempo, Detik, dan Editor karena beritanya kritis ke pemerintah.

- Pembatasan ekspresi lewat sensor, pengawasan isi berita, dan ancaman ke jurnalis. Media dipaksa bikin narasi yang dukung pemerintah.

Akibatnya fungsi pers sebagai pengawas pemerintah & penyalur aspirasi rakyat mati. Ide & kritik jadi sangat terbatas. Kontrol ini makin ketat setelah peristiwa Malari 1974.

6. Gerakan Perempuan (1966-1998)

Ruang gerak dibatasi. Pemerintah akui penting tapi perannya cuma sebagai pendukung stabilitas keluarga & negara.

- Perempuan diarahkan peran domestik: istri & ibu yang baik, peran politik & pengambilan keputusan dibatasi.
- Dibentuk organisasi kendali negara: PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan Dharma Wanita sebagai alat sosialisasi program pemerintah. Tidak boleh kritik atau perjuangkan kepentingan sendiri.
- Dikenal istilah "ibuisme negara": perempuan = ibu rumah tangga pendamping suami. Ini hambat kesetaraan gender.
- Gerakan jadi pasif & terkontrol negara. Baru bisa bebas & kritis setelah Orde Baru jatuh & masuk Reformasi 1998.

7. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Orde Baru pakai istilah Demokrasi Pancasila, tapi menurut M. Rusli Karim praktiknya justru otoriter.

Cirinya:

- Dominan peran ABRI, birokratisasi & sentralisasi pengambilan keputusan politik
- Pengebirian peran & fungsi partai politik
- Pemerintah campur tangan di partai politik & publik
- Monolotisasi ideologi negara
- Inkorporasi lembaga pemerintahan

Dalam praktiknya Presiden jadi pusat kekuasaan dari semua proses politik. Lembaga suprastruktur (DPR, MPR, DPA, BPK, MA) dan infrastruktur (LSM & parpol) dikontrol, cuma berfungsi bantu pemerintah. Golkar & ABRI diberi hak kontrol & landasan konstitusional lebih formal.

Akhirnya Demokrasi Pancasila tidak beri ruang demokrasi, kebebasan rakyat berpartisipasi ditutup sama sekali. Di akhir Orde Baru, elite politik makin tidak peduli aspirasi rakyat.

Latihan Soal Sejarah

Soal Pilihan Ganda

1. Landasan kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru yang mencakup stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan dikenal dengan istilah...

    a. Pancausaha Tani
    b. Trilogi Pembangunan
    c. Repelita
    d. Demokrasi Pancasila
    e. Wajib Belajar

2. Program pengembangan intensifikasi pertanian yang terdiri atas pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan, irigasi, dan pemberantasan hama disebut sebagai...

    a. Saptausaha Tani
    b. Pancausaha Tani
    c. Diversifikasi Pertanian
    d. Mekanisasi Pertanian
    e. Ekstensifikasi Pertanian

3. Perhatikan data program pertanian berikut:

    1. Pengelolaan tanah yang baik
    2. Pengairan yang teratur
    3. Pemilihan bibit unggul
    4. Pemupukan
    5. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman
    6. Pengolahan pascapanen
    7. Pemasaran hasil pertanian

    Program pengembangan intensifikasi pertanian yang mencakup seluruh ketujuh komponen di atas dinamakan...

    a. Pancausaha Tani
    b. Saptausaha Tani
    c. VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng)
    d. Proyek Padat Karya
    e. Badan Urusan Logistik (Bulog)

4. Pada masa Orde Baru, pemerintah mendirikan SD Inpres melalui Inpres No. 10/1973. Kebijakan ini bertujuan utama untuk...

a. Mengganti sistem kurikulum nasional sebanyak 4 kali
b. Mengontrol kegiatan penerbitan pers di daerah terpencil
c. Meningkatkan SDM dengan memperluas akses pendidikan tingkat SD dan SMP bagi golongan menengah ke bawah
d. Membantu anak kurang mampu melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
e. Membuka proyek padat karya bagi para pengangguran di desa

5. Undang-undang yang mengatur tentang SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) pada masa Orde Baru yang dapat mencabut izin media jika dianggap mengancam stabilitas pemerintah adalah...

   a. UU No. 11 Tahun 1966
   b. UU No. 9 Tahun 1969
   c. UU No. 21 Tahun 1982
   d. Tap MPRS 1973
   e. Inpres No. 10 Tahun 1973

6. Konsep yang menempatkan perempuan di bawah kendali negara sebagai istri, ibu rumah tangga pendamping suami, serta membatasi ruang gerak politiknya melalui organisasi seperti PKK dan Dharma Wanita dikenal dengan istilah...

   a. Demokrasi Pancasila
   b. Monolotisasi ideologi
   c. Inkorporasi lembaga pemerintahan
   d. Ibuisme negara
   e. Trilogi Pembangunan

Soal Uraian

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Trilogi Pembangunan pada masa Orde Baru dan sebutkan tiga aspek utamanya!
2. Dalam bidang pertanian, pemerintah Orde Baru melakukan intensifikasi pertanian melalui program Pancausaha Tani yang kemudian dikembangkan menjadi Saptausaha Tani. Sebutkan komponen-komponen kegiatan yang terdapat dalam program Saptausaha Tani!
3. Jelaskan dua kebijakan utama yang dilakukan pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)!
4. Meskipun pada awalnya pemerintah Orde Baru menjanjikan kebebasan pers melalui UU Pers No. 11 Tahun 1966, pada kenyataannya pers dikontrol secara ketat. Bagaimana cara pemerintah mengontrol pers pada masa itu?
5. Jelaskan konsep "ibuisme negara" dalam kaitannya dengan gerakan perempuan pada masa Orde Baru (1966–1998)!